SP- 130/KLI/2022

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2022, Upaya Jaga Akuntabilitas Keuangan Negara agar Bangsa Pulih Lebih Cepat

Jakarta, 22 September 2022 - Untuk menguatkan kembali komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara melalui pertanggungjawaban APBN/APBD, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 dengan tema "Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat". Acara ini dihadiri oleh para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, akademisi, dan pimpinan institusi terkait. Tujuan penyelenggaraan Rakernas antara lain untuk meningkatkan *awareness* atas pentingnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pada masing-masing entitas pelaporan, juga untuk mewujudkan penguatan kualitas dan akuntabilitas keuangan dan kinerja pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, Rakernas diadakan untuk menjaga komitmen dan kesamaan langkah dalam percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional serta memberikan apresiasi atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Melalui sambutannya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bagaimana tantangan yang bersumber dari kondisi pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian global yang sedang dihadapi oleh negara kita. Pilihan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan kepada upaya untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian. Pilihan tersebut kemudian diterjemahkan dalam instrumen APBN yang harus bekerja luar biasa berat untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. APBN didesain untuk dapat fleksibel dalam merespons tantangan multidimensi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi. Kebijakan *countercyclical* APBN dalam bentuk pelebaran defisit di atas maksimum 3 persen dari Produk Domestik Bruto, adalah langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia.

"Dalam dua tahun terakhir kita menghadapi tantangan Covid-19 yang sangat tidak biasa. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD dalam situasi yang sangat *extraordinary* ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, dalam memimpin Kementerian Negara dan Lembaga serta daerah tetap mengedepankan juga aspek akuntabilitas penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab meskipun tantangannya sangat-sangat luar biasa. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah," jelas Menkeu.

Selanjutnya, Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja atau mengutamakan belanja prioritas dalam rangka pelayanan publik dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan mengingatkan bahwa dalam setiap rupiah penggunaan uang rakyat tidak hanya dapat terukur dari sisi capaian *output*, tetapi juga *outcome* serta manfaat yang dihasilkan harus benar-benar untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Apresiasi juga diberikan Menkeu atas terjaganya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Terjaganya kualitas laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD membuktikan komitmen dan keseriusan para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Kepala Daerah serta seluruh pengelola keuangan negara dan pengelola keuangan daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik meskipun dihadapkan pada tekanan akibat masih berlangsungnya pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2021.

Terjaganya dan terus meningkatnya kualitas laporan keuangan tidak saja menggambarkan keberhasilan seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah selaku auditee, tetapi juga merupakan keberhasilan bagi auditor BPK yang telah memberikan berbagai rekomendasi konstruktif dalam Laporan Hasil Pemeriksaannya. Sinergi dan komunikasi yang baik yang sudah terbangun selama ini antara auditee dan auditor dapat secara nyata mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah yang makin akuntabel menuju percepatan pulih dan bangkitnya negeri ini.

Pada Rakernas ini, Menteri Keuangan mewakili Pemerintah menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori raihan Opini WTP minimal 15 kali dan 10 kali berturut-turut. Menteri Keuangan juga menyampaikan apresiasi bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan atas Laporan Keuangan Tahun 2021. Opini WTP atas Laporan Keuangan menjadi salah satu indikator penting pengelolaan keuangan negara yang baik, sehingga dapat mendukung tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Tentu kita berharap tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia," tegas Menkeu.

Dengan pelaksanaan Rakernas ini, Pemerintah mengharapkan terwujudnya komitmen dan semangat bersama yang terbangun untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang makin sehat. Pengelolaan keuangan yang sehat akan mendorong Indonesia untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dalam mencapai tujuan bernegara.

***

Narahubung Media:

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan

kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

KemenkeuRI Kemenkeuri @kemenkeuRI Kemenkeu RI

Lampiran I
Siaran Pers SP- /KLI/2022
Tanggal 22 September 2022

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN
ATAS RAIHAN OPINI WTP MINIMAL 15 KALI BERTURUT-TURUT

No	Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah	Keterangan
1.	Dewan Perwakilan Daerah	16 kali berturut-turut
2.	Mahkamah Konstitusi	16 kali berturut-turut
3.	Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	16 kali berturut-turut
4.	Badan Pemeriksa Keuangan	15 kali berturut-turut
5.	Komisi Yudisial	15 kali berturut-turut
6.	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	15 kali berturut-turut
7.	Badan Intelijen Negara	15 kali berturut-turut
8.	Dewan Ketahanan Nasional	15 kali berturut-turut
9.	Lembaga Administrasi Negara	15 kali berturut-turut
10.	Pemerintah Kota Tangerang	15 kali berturut-turut

Lampiran II
Siaran Pers SP- /KLI/2022
Tanggal 22 September 2022

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN
ATAS RAIHAN OPINI WTP MINIMAL 10 KALI BERTURUT-TURUT
KEMENTERIAN/LEMBAGA

No	Kementerian/Lembaga	Keterangan
1.	Majelis Permusyawaratan Rakyat	14 kali berturut-turut
2.	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	14 kali berturut-turut
3.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	14 kali berturut-turut
4.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	14 kali berturut-turut
5.	Kementerian Perindustrian	14 kali berturut-turut
6.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	14 kali berturut-turut
7.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal)	14 kali berturut-turut
8.	Badan Narkotika Nasional	14 kali berturut-turut
9.	Dewan Perwakilan Rakyat	13 kali berturut-turut
10.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13 kali berturut-turut
11.	Kepolisian Negara Republik Indonesia	13 kali berturut-turut
12.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	13 kali berturut-turut
13.	Badan Tenaga Nuklir Nasional (telah menjadi bagian dari BRIN)	13 kali berturut-turut
14.	Badan Kepegawaian Negara	13 kali berturut-turut
15.	Kementerian Sekretariat Negara	12 kali berturut-turut
16.	Kementerian Keuangan	11 kali berturut-turut
17.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	11 kali berturut-turut
18.	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)	11 kali berturut-turut
19.	Mahkamah Agung	10 kali berturut-turut
20.	Kementerian Kesehatan	10 kali berturut-turut
21.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	10 kali berturut-turut
22.	Sekretariat Kabinet	10 kali berturut-turut
23.	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	10 kali berturut-turut

Lampiran II
Siaran Pers SP- /KLI/2022
Tanggal 22 September 2022

DAFTAR PENERIMA PLAKAT PENGHARGAAN
ATAS RAIHAN OPINI WTP MINIMAL 10 KALI BERTURUT-TURUT
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	**Pemerintah Provinsi**	**Keterangan**
1.	**Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**	12 kali berturut-turut
2.	Provinsi Kepulauan Riau	12 kali berturut-turut
3.	Provinsi Jawa Tengah	11 kali berturut-turut
4.	Provinsi Jawa Barat	11 kali berturut-turut
5.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	11 kali berturut-turut
6.	Provinsi Sumatera Barat	10 kali berturut-turut
7.	Provinsi Riau	10 kali berturut-turut
8.	Provinsi Jambi	10 kali berturut-turut
No	**Pemerintah Kota**	**Keterangan**
1.	Kota Banda Aceh	14 kali berturut-turut
2.	Kota Yogyakarta	13 kali berturut-turut
3.	Kota Sabang	13 kali berturut-turut
4.	Kota Palembang	12 kali berturut-turut
5.	Kota Surakarta	12 kali berturut-turut
6.	Kota Blitar	12 kali berturut-turut
7.	Kota Metro	12 kali berturut-turut
8.	Kota Banjar	12 kali berturut-turut
9.	Kota Lubuk Linggau	11 kali berturut-turut
10.	Kota Depok	11 kali berturut-turut
11.	Kota Malang	11 kali berturut-turut
12.	Kota Pontianak	11 kali berturut-turut
13.	Kota Bitung	11 kali berturut-turut
14.	Kota Surabaya	10 kali berturut-turut
15.	Kota Denpasar	10 kali berturut-turut
16.	Kota Batam	10 kali berturut-turut
No	**Pemerintah Kabupaten**	**Keterangan**
1.	Kabupaten Tangerang	14 kali berturut-turut
2.	Kabupaten Nagan Raya	14 kali berturut-turut
3.	Kabupaten Jepara	12 kali berturut-turut

4.	Kabupaten Lampung Barat	12 kali berturut-turut
5.	Kabupaten Way Kanan	12 kali berturut-turut
6.	Kabupaten Semarang	11 kali berturut-turut
7.	Kabupaten Sleman	11 kali berturut-turut
8.	Kabupaten Serang	11 kali berturut-turut
9.	Kabupaten Banyumas	11 kali berturut-turut
10.	Kabupaten Boyolali	11 kali berturut-turut
11.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	11 kali berturut-turut
12.	Kabupaten Bintan	11 kali berturut-turut
13.	Kabupaten Tanah Datar	11 kali berturut-turut
14.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	11 kali berturut-turut
15.	Kabupaten Kuantan Singingi	11 kali berturut-turut
16.	Kabupaten Siak	11 kali berturut-turut
17.	Kabupaten Banyuasin	11 kali berturut-turut
18.	Kabupaten Aceh Besar	10 kali berturut-turut
19.	Kabupaten Kepulauan Meranti	10 kali berturut-turut
20.	Kabupaten Pelalawan	10 kali berturut-turut
21.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	10 kali berturut-turut
22.	Kabupaten Karimun	10 kali berturut-turut
23.	Kabupaten Kudus	10 kali berturut-turut
24.	Kabupaten Purworejo	10 kali berturut-turut
25.	Kabupaten Temanggung	10 kali berturut-turut
26.	Kabupaten Bantul	10 kali berturut-turut
27.	Kabupaten Banyuwangi	10 kali berturut-turut
28	Kabupaten Ponorogo	10 kali berturut-turut
29	Kabupaten Lombok Tengah	10 kali berturut-turut
30	Kabupaten Sumbawa	10 kali berturut-turut
31	Kabupaten Sekadau	10 kali berturut-turut
32	Kabupaten Sintang	10 kali berturut-turut
33	Kabupaten Sukamara	10 kali berturut-turut
34	Kabupaten Banggai	10 kali berturut-turut
35.	Kabupaten Tojo Una Una	10 kali berturut-turut
36.	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	10 kali berturut-turut
37.	Kabupaten Pinrang	10 kali berturut-turut
38.	Kabupaten Gorontalo	10 kali berturut-turut